

2024

RENCANA KERJA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Di dalam Rencana Kerja Perubahan ini merumuskan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Tapin. Yang selanjutnya, dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini mungkin ditemui data dan informasi yang belum optimal. Untuk itu, atas kekurangan dan kelemahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin ini masih memerlukan kesempurnaan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis di dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan ini.

Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan pada sektor Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tapin.

Rantau, Agustus 2023

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin,



H. Yustan Azidin, ST, MT
NIP. 19690110 199603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023	II-9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2022 Per Triwulan	II-13
2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	II-17
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	II-25
2.5. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.....	II-52
2.6. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-53
2.7. Review Terhadap Rancangan RKPD	II-55

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-69
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III-69
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023	III-83
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-95
V. PENUTUP	V-108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2023. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun rencana tahunan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan dalam periode 1 tahun untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang

akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan rencana program dan kegiatan yang baik. Perencanaan program dan kegiatan harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” serta mendukung kondisi tersebut di atas, maka perlu peningkatan kinerja di bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro. Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain, rencana program dan kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun

- 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
27. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/034/KUM/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin;
28. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/01-Randal.Bappelitbang/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

29. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program SKPD, program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024, meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 Per Triwulan
- 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.5. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
- 2.6. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2.7. Review Terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini memuat kajian atau review terhadap evaluasi capaian Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang akan dihadapi. Sedangkan capaian target Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berdasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kajian atau review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian tahun lalu, yaitu tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 hingga triwulan III, telah dicapai tingkat realisasi rata-rata yang menunjukkan angka 61,71% terhadap Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Perindustrian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian atau review terhadap

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kode	Program	Indikator Program	Target dan Realisasi Program Tahun 2023		Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	10%	10%	Rp. 16.954.800	Rp. 12.225.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	10%	10%	Rp. 16.787.694	Rp. 12.486.644
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	10%	10%	Rp. 44.666.250	Rp. 37.356.756
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Produk UMKM Lokal yang Masuk Pasar Modern	10%	-	Rp. 67.831.725	-

3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Komponen AKIP	71	-	Rp. 5.325.327.212	Rp. 3.811.928.512
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80%	85,7%		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	80%		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Agro dan Kimia yang Masuk Pasar Modern	50%		Rp. 1.158.904.215	Rp. 355.917.073
		Persentase Peningkatan Omzet Penjualan Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia	0,27%			
		Persentase IKM Berbasis Agro dan Kimia yang Sesuai Standar	0,47%			
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Agro dan Kimia	0,63%			
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Logam dan Aneka yang Masuk Pasar Modern	25%		Rp. 203.990.000	-

		Persentase IKM Berbasis Logam dan Aneka yang Sesuai Standar	54,72%			
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Logam dan Aneka	4,97%			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Logam dan Aneka yang Masuk Pasar Modern	25%		Rp. 134.975.766	Rp. 70.865.000
		Persentase IKM Berbasis Logam dan Aneka yang Sesuai Standar	54,72%			
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Logam dan Aneka	4,97%			

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 Per Triwulan

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023 dari triwulan I hingga triwulan ke III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Triwulan I – Triwulan II Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA																										
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN MONEV TRIWULAN I-IV																										
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023																										
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota s/d tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab
				7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		14 = 12		15 = 13						
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	48,65	%	16.954.800	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0	0,00	%	Rp0	0,00	0		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Telah Dinilai/Diperingkat	100	%	16.954.800	0	%	Rp0	0	%	Rp0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0	0,00	%	Rp0	0,00	0		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Unit Usaha/Kop erasi	16.954.800	0	Unit Usaha/Kop erasi	Rp0	0	Unit Usaha/Ko perasi	Rp0	0	Unit Usaha/Kop erasi	Rp0	0	Unit Usaha/Kop erasi	Rp0	0,00	0	0	Unit Usaha/Kop erasi	Rp0	0,00	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		0,00	0,00							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		SR	SR							
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	48,65	%	16.787.694	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0	0,00	%	Rp0	0,00	0		
		Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	100	%	16.787.694	0	%	Rp0	0	%	Rp0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0	0,00	%	Rp0	0,00	0		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	30	Orang	16.787.694	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0,00	0	0	Orang	Rp0	0,00	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		0,00	0,00							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		SR	SR							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	48,65	%	44.666.250	0,00	%	Rp3.600.000	0,00	%	Rp3.600.000	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	16,12	0,00	%	Rp7.200.000	0,00	16,12		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Mengikuti RAT	100	%	44.666.250	0	%	Rp3.600.000	0	%	Rp3.600.000	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	16,12	0,00	%	Rp7.200.000	0,00	16,12		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30	Orang	44.666.250	0	Orang	Rp3.600.000	0	Orang	Rp3.600.000	Orang	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp7.200.000	0,00	16,12	0	Orang	Rp7.200.000	0,00	16,12
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		0,00	16,12							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		SR	SR							
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha	17,05	%	67.831.725	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0,00	0,00	%	Rp0	0,00	0,00		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Produksi UMKM yang Dibina	%	67.831.725	0	%	Rp0	0	%	Rp0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	#DIV/0!	0,00	0,00	%	Rp0	#DIV/0!	0,00
		Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	67.831.725	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	#DIV/0!	0,00	0	Unit Usaha	Rp0	#DIV/0!	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		#DIV/0!	0,00							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		#DIV/0!	SR							

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	80	Nilai	4.530.572.153	25	%	Rp697.969.064	25	%	Rp1.291.274.406	%	0	%	Rp0	50	%	Rp1.989.243.470	62,50	43,91	50,00	%	Rp1.989.243.470	62,50	43,91																					
			Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	80	%																																										
			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80	%		25	%	Rp0	25	%		%	0	%	Rp0	50	%		62,50																											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun n+1 yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	80	%	7.500.189	25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	50,00	%	Rp0	62,50	0,00	50,00	%	Rp0	62,50	0,00																			
			Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappeltbang	80	%		25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%		50,00			62,50																									
			Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	80	%		25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%																														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	7.500.189	7	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	9	Laporan	Rp0	69,23	0,00	9	Laporan	Rp0	69,23	0,00																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				69,23	0,00																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				S	SR																										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100	%	2.976.517.845	25	%	Rp539.392.000	25	%	Rp982.575.115	%	0	%	Rp0	50,00	%	Rp1.521.967.115	50,00	51,13	50,00	%	Rp1.521.967.115	50,00	51,13																					
			Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	%		25	%		25	%		%	0	%	Rp0	50,00	%		50,00																											
			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100																																											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	4.250.343	1	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	1	Laporan	Rp0	12,50	0,00	1	Laporan	Rp0	12,50	0,00																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	3.250.219	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/Bulan	2.969.017.283	22	Orang/Bulan	Rp539.392.000	22	Orang/Bulan	Rp982.575.115	0	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	Rp0	44	Orang/Bulan	Rp1.521.967.115	200,00	51,26	44	Orang/Bulan	Rp1.521.967.115	200,00	51,26																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				70,83	17,09																										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				S	SR																										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat	80	Indeks Kepuasan	1.123.582.692		Indeks Kepuasan	Rp134.825.480		Indeks Kepuasan	Rp213.396.496	0	Indeks Kepuasan	Rp0	0	Indeks Kepuasan	Rp0	0,00	Indeks Kepuasan	Rp348.221.976	0,00	30,99	0,00	Indeks Kepuasan	Rp348.221.976	0,00	30,99																			

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.830.500	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0,00	0,00	0	Paket	Rp0	0,00	0,00											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	49.616.838	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp11.552.500	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp11.552.500	100,00	23,28	1	Paket	Rp11.552.500	100,00	23,28											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	85.130.406	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0,00	0,00	0	Paket	Rp0	0,00	0,00											
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	29.400.168	1	Paket	Rp400.000	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp400.000	25,00	1,36	1	Paket	Rp400.000	25,00	1,36											
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1.354.830	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0,00	0,00	0	Paket	Rp0	0,00	0,00											
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	4.495.950	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	949.754.000	1	Laporan	Rp134.425.480	1	Laporan	Rp201.843.996	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp336.269.476	50,00	35,41	2	Laporan	Rp336.269.476	50,00	35,41											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			25,00	8,58																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR																
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80	%	212.156.698		%	Rp0		%	Rp67.667.117	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp67.667.117	0,00	31,89	0,00	%	Rp67.667.117	0,00	31,89								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	212.156.698	0	Unit	Rp0	17	Unit	Rp67.667.117	0	Unit	Rp0	17	Unit	Rp67.667.117	106,25	31,89	17	Unit	Rp67.667.117	106,25	31,89											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			106,25	31,89																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			ST	SR																
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	80	%	170.052.800		%	Rp21.751.584		%	Rp24.350.878	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0,00	%	Rp0	0,00	0,00									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	81.320.000	1	Laporan	Rp7.351.584	1	Laporan	Rp9.950.878	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp0	50,00	0,00	2	Laporan	Rp0	50,00	0,00											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	88.732.800	1	Laporan	Rp14.400.000	1	Laporan	Rp14.400.000	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp0	50,00	0,00	2	Laporan	Rp0	50,00	0,00											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			50,00	0,00																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80	%	40.761.929		%	Rp2.000.000		%	Rp3.284.800	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp5.284.800	0,00	12,97	0,00	%	Rp5.284.800	0,00	12,97								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	28.611.929	1	Unit	Rp2.000.000	1	Unit	Rp3.284.800	0	Unit	Rp0	2	Unit	Rp5.284.800	40,00	18,47	2	Unit	Rp5.284.800	40,00	18,47											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	12.150.000	0	Unit	Rp0	8	Unit	Rp0	0	Unit	Rp0	8	Unit	Rp0	#DIV/0!	0,00	8	Unit	Rp0	#DIV/0!	0,00											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			#DIV/0!	9,24																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			#DIV/0!	SR																
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			#DIV/0!	14,31																
Predikat Kinerja Kegiatan																			#DIV/0!	SR																
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,65	%	726.926.872	0,056170759	%	Rp23.360.500	0,44134	%	Rp121.734.132	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,4975124	%	Rp144.094.632	76,54	19,82	0,50	%	Rp144.094.632	76,54	19,82								
			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,65	%			%			%			%			%	0	%																	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase KM yang Berstandar dan Bersertifikat	0,2	%	726.926.872	0	%	Rp23.360.500	0	%	Rp121.734.132	0	%	Rp0	0,00	%	Rp144.094.632	0,00	19,82	0,00	%	Rp144.094.632	0,00	19,82											
			Persentase Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	75	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0																		
			Persentase KM yang Melakukan Promosi Melalui Media Online (Website)	0,13	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%																			
				0,4	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0																		

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dokumen	10.999.850	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	Dokumen	108.792.156	1	Dokumen	Rp5.966.780	1	Dokumen	Rp17.328.060	0	Dokumen	Rp0	2	Dokumen	Rp23.294.840	50,00	21,41	2	Dokumen	Rp23.294.840	50,00	21,41																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	Dokumen	147.049.040	1	Dokumen	Rp8.532.220	1	Dokumen	Rp22.190.072	0	Dokumen	Rp0	2	Dokumen	Rp30.722.292	50,00	20,89	2	Dokumen	Rp30.722.292	50,00	20,89																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dokumen	460.085.826	1	Dokumen	Rp7.861.500	1	Dokumen	Rp82.216.000	0	Dokumen	Rp0	2	Dokumen	Rp90.077.500	40,00	19,58	2	Dokumen	Rp90.077.500	40,00	19,58																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			35,00	15,47																								
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,98	%	61.359.342	0	%	Rp0	0	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	25	%	Rp0	628,14	0,00	25,00	%	Rp0	628,14	0,00																	
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,44	%			%			%			%			%			%				%																					
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	0,16	%	61.359.342	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0,00	0,00	%	Rp0	0,00	0,00																			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	Dokumen	61.359.342	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00																			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR																								
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,98	%	138.369.986	0	%	Rp13.800.000	0	%	Rp13.800.000	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp27.600.000	0,00	19,95	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	19,95																	
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,44	%			%			%		0	%	0	0	%	0	0	%	Rp0	0,00	0,00	%																					
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	33	%	138.369.986	0	%	Rp13.800.000	0	%	Rp13.800.000	0	%	Rp0	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	19,95	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	19,95																			
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	4	Dokumen	97.734.498	1	Dokumen	Rp13.800.000	1	Dokumen	Rp13.800.000	0	Dokumen	Rp0	2	Dokumen	Rp27.600.000	50,00	28,24	2	Dokumen	Rp27.600.000	50,00	28,24																			
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	1	Dokumen	31.303.062	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00																			
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	1	Dokumen	9.332.426	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00	0	Dokumen	Rp0	0,00	0,00																			
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR																								
Jumlah Anggaran dan				5.603.468.822		737.729.564		1.430.408.538		0		Rp0		Rp2.168.138.102				Rp2.168.138.102		95,90	12,47			Rp2.168.138.102																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																			95,90	12,47																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																			ST	SR																								

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Triwulan III Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA																												
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN MONEV TRIWULAN I-IV																												
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023																												
No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2023 (%)		Unit Penanggung Jawab			
					7		8		9		10		11		12		13 = (12/7x100)		14 = 12		15 = 13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	10	%	16.954.800	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp12.225.000	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp12.225.000	100,00	72	10,00	%	Rp12.225.000	100,00	72
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif yang mempunyai sertifikat	40	%	16.954.800	0	%	Rp0	0	%	Rp0	40	%	Rp12.225.000	0	%	Rp0	40,00	%	Rp12.225.000	100,00	72	40,00	%	Rp12.225.000	100,00	72
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Unit Usaha/Koperasi	16.954.800	0	Unit Usaha/Koperasi	Rp0	0	Unit Usaha/Koperasi	Rp0	3	Unit Usaha/Koperasi	Rp12.225.000	0	Unit Usaha/Koperasi	Rp0	3	Unit Usaha/Koperasi	Rp12.225.000	100,00	72	3	Unit Usaha/Koperasi	Rp12.225.000	100,00	72
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	100,00	72,10										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	ST	S										
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	10	%	16.787.694	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp0	100,00	0	10,00	%	Rp0	100,00	0
		Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	10	%	16.787.694	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0	0,00	%	Rp0	0,00	0
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	30	Orang	16.787.694	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp0	0,00	0	0	Orang	Rp0	0,00	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	0,00	0,00										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	SR	SR										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	10	%	44.666.250	0,00	%	Rp3.600.000	0,00	%	Rp3.600.000	0,00	%	Rp20.400.000	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	61,79	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	61,79
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	10	%	44.666.250	0	%	Rp3.600.000	0	%	Rp3.600.000	0	%	Rp20.400.000	0	%	Rp0	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	61,79	0,00	%	Rp27.600.000	0,00	61,79
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kolaborasi, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMM dan Kewirausahaan	30	Orang	44.666.250	0	Orang	Rp3.600.000	0	Orang	Rp3.600.000	0	Orang	Rp20.400.000	0	Orang	Rp0	0	Orang	Rp27.600.000	0,00	61,79	0	Orang	Rp27.600.000	0,00	61,79
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	0,00	61,79										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	SR	R										
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Produk UMKM Lokal yang Masuk Pasar Modern	10	%	67.831.725	0,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp0	0,00	%	Rp0	10,00	%	Rp0	100,00	0,00	10,00	%	Rp0	100,00	0,00

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase pengelolaan website Sistem Informasi dan Promosi UMKM daerah yang baik	1%	%	67.831.725	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0,00	%	Rp0	0,00	0,00	0,00	%	Rp0	0,00	0,00
		Persentase pengemasan produk lokal yang sesuai standar	25%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Pengemasan Produk	50%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase pelaku usaha yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	50%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi yang lulus post test	100%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase pelaku usaha yang mempunyai Sertifikat Halal	25%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase Pelaku Usaha yang mengurus izin sertifikat halal	50%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase pelaku usaha yang mempunyai P-IRT	40%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase Pelaku Usaha yang mengurus izin Industri Rumah Tangga (P-IRT)	50%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
		Persentase Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi yang lulus post test	100%	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	67.831.725	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	0	Unit Usaha	Rp0	#DIV/0!	0,00	0	Unit Usaha	Rp0	#DIV/0!	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				#DIV/0!	0,00						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				#DIV/0!	SR						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	Perencanaan Kinerja = 22,50	Nilai	5.247.727.212	25	%	Rp697.969.064	25	%	Rp1.291.274.406	0	%	Rp1.015.557.099	0	%	Rp0	50	%	Rp3.004.800.569	#VALUE!	57,26	50,00	%	Rp3.004.800.569	#VALUE!	57,26
			Pengukuran Kinerja = 18,00	Nilai																							
			Pelaporan Kinerja = 12,00	Nilai																							
			Evaluasi Kinerja = 18,50	Nilai																							
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100	%																							
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80	%	25	%	Rp0	25	%	0	%	0	%	0	%	Rp0	50	%			62,50						
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	%	25	%	Rp0	25	%	0	%	0	%	0	%	Rp0	50	%			62,50						

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100	%	7.500.189	25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	50,00	%	Rp0	50,00	0,00	50,00	%	Rp0	50,00	0,00																					
			Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappellitbang	100	%		25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%		50,00			50,00																											
			Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100	%		25	%	Rp0	25	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%																																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	7.500.189	7	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	9	Laporan	Rp0	69,23	0,00	9	Laporan	Rp0	69,23	0,00																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					69,23	0,00																											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					S	SR																											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100	%	3.039.693.373	25	%	Rp539.392.000	25	%	Rp982.575.115	25	%	Rp628.763.994	0	%	Rp0	75,00	%	Rp2.150.731.109	75,00	70,75	75,00	%	Rp2.150.731.109	75,00	70,75																					
			Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	%		25	%		25	%		25	%	Rp0	0	%	Rp0	75,00	%		75,00																											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	4.250.343	1	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	1	Laporan	Rp0	12,50	0,00	1	Laporan	Rp0	12,50	0,00																					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	3.250.219	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00	0	Laporan	Rp0	0,00	0,00																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/Bulan	3.032.190.811	22	Orang/Bulan	Rp539.392.000	22	Orang/Bulan	Rp982.575.115	0	Orang/Bulan	Rp628.763.994	0	Orang/Bulan	Rp0	44	Orang/Bulan	Rp2.150.731.109	200,00	70,93	44	Orang/Bulan	Rp2.150.731.109	200,00	70,93																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					70,83	23,64																											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					S	SR																											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80	Indeks Kepuasan	1.585.376.766		Indeks Kepuasan	Rp134.825.480		Indeks Kepuasan	Rp213.396.496	0	Indeks Kepuasan	Rp333.931.062	0	Indeks Kepuasan	Rp0	0,00	Indeks Kepuasan	Rp682.153.038	0,00	43,03	0,00	Indeks Kepuasan	Rp682.153.038	0,00	43,03																					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.830.500	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp1.890.000	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp1.890.000	0,00	49,34	0	Paket	Rp1.890.000	0,00	49,34																					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.497.110	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp1.552.500	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp1.552.500	100,00	22,88	1	Paket	Rp1.552.500	100,00	22,88																					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	90.902.322	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp33.619.500	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp33.619.500	0,00	36,98	0	Paket	Rp33.619.500	0,00	36,98																					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	22.406.304	1	Paket	Rp400.000	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp9.993.100	0	Paket	Rp0	1	Paket	Rp10.393.100	25,00	46,38	1	Paket	Rp10.393.100	25,00	46,38																					
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1.354.830	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0	Paket	Rp0	0,00	0,00	0	Paket	Rp0	0,00	0,00																					
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	3.491.700	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp630.000	0	Laporan	Rp0	0	Laporan	Rp630.000	0,00	18,04	0	Laporan	Rp630.000	0,00	18,04																					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.412.894.000	1	Laporan	Rp134.425.480	1	Laporan	Rp201.843.996	0	Laporan	Rp287.798.462	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp624.067.938	50,00	44,17	2	Laporan	Rp624.067.938	50,00	44,17																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					25,00	31,11																											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR																											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80	%	381.206.834		%	Rp0		%	Rp67.667.117	0	%	Rp885.000	0	%	Rp0	0,00	%	Rp68.552.117	0,00	17,98	0,00	%	Rp68.552.117	0,00	17,98																					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	381.206.834	0	Unit	Rp0	17	Unit	Rp67.667.117	0	Unit	Rp885.000	0	Unit	Rp0	17	Unit	Rp68.552.117	106,25	17,98	17	Unit	Rp68.552.117	106,25	17,98																					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					106,25	17,98																											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					ST	SR																											

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70	%	188.167.824		%	Rp21.751.584		%	Rp24.350.878	0	%	Rp41.333.803	0	%	Rp0	0,00	%	Rp41.333.803	0,00	21,97	0,00	%	Rp41.333.803	0,00	21,97																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	64.135.024	1	Laporan	Rp7.351.584	1	Laporan	Rp9.950.878	0	Laporan	Rp11.367.404	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp11.367.404	50,00	17,72	2	Laporan	Rp11.367.404	50,00	17,72																				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	124.032.800	1	Laporan	Rp14.400.000	1	Laporan	Rp14.400.000	0	Laporan	Rp29.966.399	0	Laporan	Rp0	2	Laporan	Rp29.966.399	50,00	24,16	2	Laporan	Rp29.966.399	50,00	24,16																				
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	50,00	20,94																								
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	SR	SR																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80	%	45.784.226		%	Rp2.000.000		%	Rp3.284.800	0	%	Rp10.643.240	0	%	Rp0	0,00	%	Rp15.928.040	0,00	34,79	0,00	%	Rp15.928.040	0,00	34,79																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	36.344.226	1	Unit	Rp2.000.000	1	Unit	Rp3.284.800	0	Unit	Rp7.843.240	0	Unit	Rp0	2	Unit	Rp13.128.040	40,00	36,12	2	Unit	Rp13.128.040	40,00	36,12																				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	9.440.000	0	Unit	Rp0	8	Unit	Rp0	0	Unit	Rp2.800.000	0	Unit	Rp0	8	Unit	Rp2.800.000	#DIV/0!	29,66	8	Unit	Rp2.800.000	#DIV/0!	29,66																				
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	#DIV/0!	32,89																								
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan	#DIV/0!	SR																								
																						Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	22,50	32,24																								
																						Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR																								
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal berbasis agro dan kimia yang Masuk Pasar Modern	50	%	1.158.904.215	0,056170759	%	Rp22.360.500	0,44134	%	Rp121.734.132	0	%	Rp81.558.317	0	%	Rp0	0,4975124	%	Rp225.652.949	1,00	19,47	0,50	%	Rp225.652.949	1,00	19,47																				
			Persentase Peningkatan omzet penjualan produk unggulan daerah berbasis agro dan kimia	0,27	%														0																													
			Persentase IKM berbasis agro dan kimia yang sesuai standart	0,47	%														0																													
			Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Agro dan Kimia	0,63	%		0,056170759	%		0,38517	%		0	%		0	%		0,4413417	%		70,05	0,44	%																								
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin dengan Baik	10%	%		20	%	Rp22.360.500	40	%	Rp121.734.132	0	%	Rp81.558.317	0	%	Rp0	60,00	%	Rp225.652.949	60000,00	#DIV/0!	60,00	%	Rp225.652.949	60000,00	#DIV/0!																				
			Persentase Informasi pada Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin yang Terupdate	50%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase Peningkatan Jumlah pengunjung galeri TAMASA	3,03%	%		22,66666667	%	Rp0	15	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	37,33	%																												
			Persentase pelaku usaha yang melakukan diversifikasi produk berbasis agro dan kimia	0,31%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai sertifikat Pelatihan Diversifikasi Produk berbasis agro dan kimia	0,39%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan melalui Dekranasda	33,30%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah melalui Dekranasda	100%	%		22,66666667	%	Rp0	15	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	37,33	%																												
			Persentase Pelaku Usaha IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legaltas Merk	100%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase pelaku usaha yang mempunyai Sertifikat Halal	9,30%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												
			Persentase Pelaku Usaha yang mengurus izin sertifikat halal	1,07%	%		0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0	0	%	Rp0		%																												

Berdasarkan data hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perindustrian hingga triwulan ke III, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dari keluaran (output) kegiatan yang telah ditargetkan, dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan akhir atau triwulan IV. Tingkat serapan anggaran hingga triwulan ke III adalah Rp. 4.300.778.985,- dari total seluruh anggaran Rp. 6.969.437.662,-.

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Pengukuran dan evaluasi capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dan evaluasi target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Triwulan I – Triwulan III)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Murni (Sebelum Perubahan)
Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN	TARGET	REALISASI
							2023	2023
1.	Tujuan SKPD 1: Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah nilai produksi IKM tahun n – Jumlah nilai produksi IKM tahun n-1 / Jumlah nilai produksi IKM tahun n-1 x 100	1. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia 2. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	Data Peningkatan Nilai Produksi IKM	Konversi Perhitungan Capaian IKU Kualitatif Menjadi Kuantitatif	2,63	
2.	Sasaran SKPD: Meningkatnya Partisipasi IKM dalam Perekonomian Daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	Jumlah IKM tahun (n) – Jumlah IKM tahun (n-1) / Jumlah IKM tahun n-1 x 100	1. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia 2. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	Data Pertumbuhan IKM	AA: >90-100 (Sangat Memuaskan) A: >80-90 (Memuaskan) BB: >70-80 (Sangat Baik) B: >60-70 (Baik) CC: >50-60 (Cukup/Memadai) C: >30-50 (Kurang) D: <30 (Sangat Kurang)	1,12	
3.	Tujuan SKPD 2: Meningkatkan Kapasitas UMKM Daerah	Persentase UMKM Binaan yang Naik Skala Usaha	Jumlah UMKM binaan yang naik skala usaha / Jumlah keseluruhan UMKM binaan x 100	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data UMKM Binaan yang Naik Skala Usaha		20,05	
4.	Sasaran SKPD 1: Optimalisasi Kinerja Koperasi dalam Mengembangkan Ekonomi	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah koperasi sehat (koperasi yang menjalankan RAT tiap tahun, pertumbuhan omset, dan	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data Koperasi Sehat		19,56	

	Kerakyatan		manajemen yang baik) / Jumlah koperasi aktif x 100					
5.	Sasaran SKPD 2: Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Baru	Jumlah UMKM tahun n – Jumlah UMKM tahun n-1 / Jumlah UMKM tahun n-1 x 100	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data Pertumbuhan UMKM Baru		22,5	-
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bobot Maksimal Komponen yang Dinilai: Perencanaan Kinerja = 30 Pengukuran Kinerja = 30 Pelaporan Kinerja = 15 Evaluasi Kinerja = 25	73,22	
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP – Perencanaan Kinerja					25,57	
		Nilai Komponen AKIP – Pengukuran Kinerja					14,69	
		Nilai Komponen AKIP – Pelaporan Kinerja					5,90	
		Nilai Komponen AKIP – Evaluasi Kinerja					16,38	
		Nilai Komponen AKIP – Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (komponen tahun lalu yang kemudian dihilangkan)					-	-

Untuk penjelasan atas capaian indikator kinerja pada tujuan/sasaran diuraikan sebagaimana dibawah ini:

a) Tujuan SKPD 1 : **Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah**

Pada Tujuan SKPD 1 “Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah” memiliki Sasaran SKPD yaitu “Meningkatnya Partisipasi IKM dalam Perekonomian Daerah” dengan indikator tujuan/sasaran “Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah” dan “Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh”. Data ini bersumber dari data IKAHH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan) dan ILMEA (Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka) yang ada pada Bidang Industri Agro dan Kimia, dan Bidang Industri Logam dan Aneka.

b) Tujuan SKPD 2 : **Meningkatkan Kapasitas UMKM Daerah**

Pada Tujuan SKPD 2 “Meningkatkan Kapasitas UMKM Daerah” memiliki 2 (dua) sasaran SKPD yang terkait dengan sektor Koperasi dan UMKM, yaitu yang pertama “Optimalisasi Kinerja Koperasi dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan” dengan indikator sasaran “Persentase Koperasi Sehat”, serta sasaran SKPD yang kedua yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan UMKM” dengan indikator sasaran “Persentase Pertumbuhan UMKM Baru”. UMKM yang terdata oleh Dinas Perindustrian per tahun 2022 yaitu sebanyak 878 pelaku usaha, dengan total dari tahun 2020 yaitu sebanyak 18.406 pelaku usaha. Sedangkan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun

2023 mengalami kendala dalam hal pendataan riil ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM pengampu UMKM. Oleh karena itu, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi bersama Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan pejabat sub koordinator, dapat diambil kesimpulan bahwa data UMKM yang terakomodir oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun 2022 perlu divalidasi untuk memastikan apakah UMKM yang telah terdata tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Sehingga data yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dijadikan bahan dasar dalam penentuan sasaran kinerja ke depannya. Untuk itu, pada tahun 2024 yang akan datang, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin akan menetapkan indikator sasaran pada sektor UMKM yaitu “Persentase Data UMKM yang Tervalidasi”.

Namun pada perkembangannya, seluruh SKPD di Kabupaten Tapin menyusun Perubahan Pohon Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja dan Cascading yang berakibat berubahnya Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian untuk tahun 2023. Berdasarkan hasil desk yang dilakukan bersama lintas sektor terkait, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin per tanggal 18 September berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.2
Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
(18 September 2023)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	18,5%	26,9%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71%	-
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	71%	40,3%

2.3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2022)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2021)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2020)	Capaian Sasaran (%)	Sumber Data
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM								
Persentase Koperasi Berkualitas	%	12,29	35,11	8,11	24,95	25,64	85,75	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkat	%	0	0	0	0	83	101,21	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri								
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,03	96,32	5,99	95,68	6,13	98,01	BPS

- a. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021 dan lebih rendah dari tahun 2020.
- b. Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sama dengan Tahun 2021 dan lebih rendah dari Tahun 2020.
- c. Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 lebih tinggi dari Tahun 2021 tetapi lebih rendah dari Tahun 2020.

2.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Rencana Strategis Tahun 2018-2023).

Berikut ini adalah tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta target dan realisasinya sampai dengan tahun 2022 yang termuat dalam Renstra 2018-2023:

Tabel 2.3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

SASARAN		Target Kinerja Sasaran pada tahun					Tahun 2023 (Triwulan I – Triwulan II)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
		Target	Target	Target	Target	Target	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	Target: 25% Realisasi: 25,64%	Target: 27,4% Realisasi: 25,64%	Target: 29,90% Realisasi: 25,64%	Target: 32,5% Realisasi: 8,11%	Target: 35% Realisasi: 12,29%	Target: 37,6% Realisasi: 0%
	Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan	Target: 78% Realisasi: 80%	Target: 80% Realisasi: 83%	Target: 82% Realisasi: 83%	Target: 84% Realisasi: 0%	Target: 86% Realisasi: 0%	Target: 88% Realisasi: 0%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Target: 6,21% Realisasi: 6,21%	Target: 6,22% Realisasi: 6,14%	Target: 6,24% Realisasi: 6,13%	Target: 6,26% Realisasi: 5,99%	Target: 6,28% Realisasi: 6,03%	Target: 6,30% Realisasi: 6,05%

- a. Kinerja Koperasi Berkualitas untuk tahun 2023 masih belum terealisasi, dikarenakan kegiatan Koperasi Berkualitas baru akan dilaksanakan pada triwulan II. Dan pada triwulan III, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan, sehingga Indikator Kinerja Utama dari triwulan I hingga triwulan II sudah berbeda dengan indikator yang ada di dalam dokumen perencanaan jangka menengah.
- b. Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk tahun 2023 sebesar 0%, masih sama dengan tahun 2021. Dan pada triwulan III, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan, sehingga Indikator Kinerja Utama dari triwulan I hingga triwulan II sudah berbeda dengan indikator yang ada di dalam dokumen perencanaan jangka menengah.
- c. Realisasi Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Tahun 2023 sebesar 6,05% mengalami peningkatan 0,02% dari Tahun 2022, namun masih berada di bawah target dokumen perencanaan yaitu sebesar 6,30%. Walaupun Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada triwulan III, akan tetapi realisasi kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk tahun 2023 masih dapat dihitung berdasarkan angka sangat sementara dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin.

Menanggapi perkembangan kinerja pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, maka dalam upaya optimalisasi peningkatan capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
2. Peningkatan dalam sarana dan prasarana dalam menunjang setiap pekerjaan, seperti penyediaan komputer, laptop, printer, LCD proyektor, jaringan internet, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya;
3. Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pada setiap aparatur agar kinerja setiap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan bersama di dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan baik; dan
4. Meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan yang diampu oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Dari semula adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kemudian dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang industri kerajinan dan aneka;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dalam meningkatkan kinerjanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 Telaahan Kinerja pada Kementerian Perindustrian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut: **”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yang juga sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

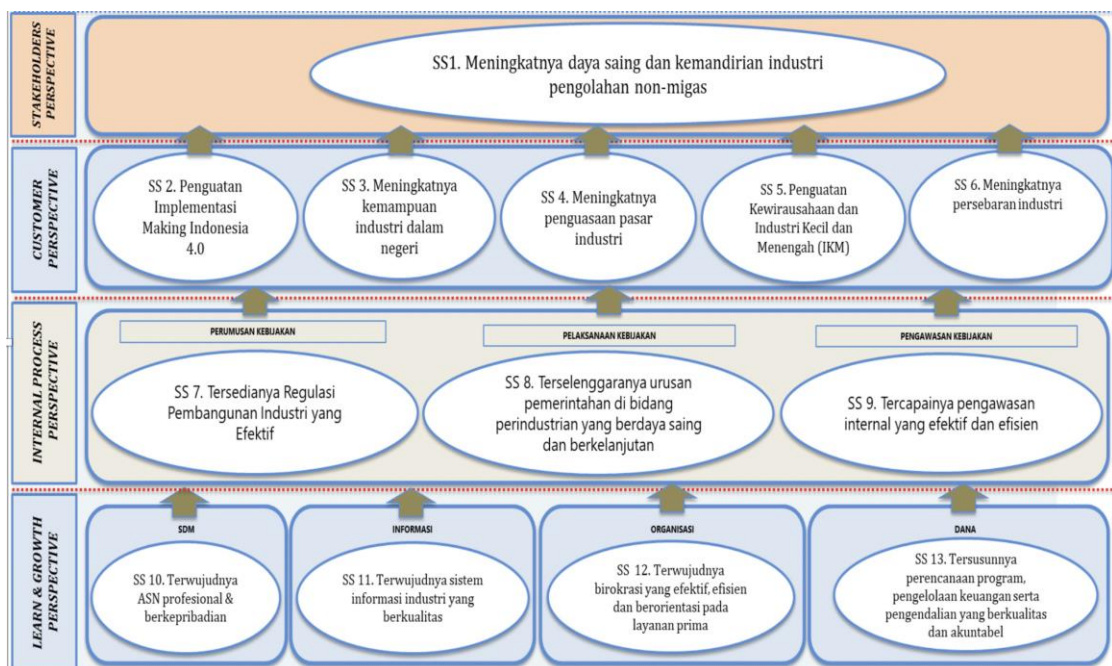
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan

industri sampai 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: **”Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4.1
Peta Strategis Kementerian Perindustrian



Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang di dalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan 1

yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian tercakup pada gambar berikut:

Gambar 2.4.2

Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian

AGENDA 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Arah Kebijakan:

a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan
- 5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
- 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6) mengembangkan industri halal.

c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- 3) mengelola impor;
- 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
- 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- 6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan
- 7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
- 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
- 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
- 5) reformasi fiskal; dan
- 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

AGENDA 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

- 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
- 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
- 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari

industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;

- 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
- 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja.

b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:

- 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
- 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
- 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
- 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
- 5) pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
- 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university, teaching university*, atau *vocational university*; dan
- 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Secara umum, sasaran Kementerian Perindustrian sudah tertuang di dalam program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Namun demikian, masih ada beberapa sasaran, tujuan dan arah kebijakan Kementerian Perindustrian di atas yang juga melibatkan instansi lintas sektor (*crosscutting*) dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, dan Bappelitbang Kabupaten Tapin.

2.4.2 Telaahan Kinerja pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan KUMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan visinya: **"Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan visi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024, maka misi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari pengembangan koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka tujuan pengembangan koperasi dan UMKM 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Entrepreneur*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

2.4.3 Telaahan Kinerja pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu "Terwujudnya Kalimantan Selatan Sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038". Dalam

mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan memetakannya ke dalam 4 (empat) misi, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah secara efisien yang mampu mendukung pembangunan komoditas industri unggulan;
2. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
4. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri.

Agar pengembangan dan pembinaan sketir industri menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan isu strategis **"Rendahnya Peran Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Daerah"**. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel Matriks Rancangan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan berikut:

Tabel 2.4.1

Matriks Rancangan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan							
Rendahnya Peran Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Produk yang Dihasilkan Melalui Penerapan Technological Readiness Level (TRL) Skala 9	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Produk Industri yang Masuk Pasar Dalam Negeri dan Ekspor	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam							
				Persentase Tenaga Kerja yang Terserap pada Sektor Industri						Persentase SDM industri yang Terampil							
										Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna							
																Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Produk Industri yang Bersertifikat SNI
															Persentase Produk Industri yang Bersertifikat HALAL		
															Persentase Industri yang Bersertifikat MD		
															Persentase Industri yang Bersertifikat PIRT		
															Persentase Industri yang Bersertifikat Industri Hijau		
															Persentase Kawasan Industri yang Operasional		
															Persentase Sentra IKM yang Operasional		

									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Naik Kelas
										Jumlah Desain Baru Produk Industri
										Jumlah Produk Industri Logam yang Dirancang dan Direkayasa
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Industri yang Berizin	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Industri Baru yang Diterbitkan Izin Usaha Efektifnya
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Industri yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Pengawasan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kenaikan Nilai Produksi Industri	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri	Data dan Informasi Sesuai dengan Kebutuhan Pengambil Keputusan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Data dan Informasi Industri Secara Periodik
									Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Industri yang Valid

							Nasional (SIINas)			
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

2.4.4 Telaahan Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pelaksanaan administrasi dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Koperasi di Kalimantan Selatan, bila dilihat dari perspektif aspek Kelembagaan, SDM, permodalan, pemasaran, teknologi, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah baik dari RAT maupun kegiatan lainnya yang diberikan sebagai pemilik modal;
2. Keterbatasan dana yang dimiliki;
3. Tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para Pengurus/Pengawas dan anggota terbatas;
4. Keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SHU;
5. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang;
6. Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi;
7. Keterbatasan penggunaan Teknologi tepat guna dan informasi
8. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim;
9. Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor;
10. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminat dari masyarakatnya kurang, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan;
11. Kurangnya edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat; dan
12. Sedikitnya masyarakat untuk berwirausaha.

2.4.4.1 Perkembangan Koperasi 2016-2021 di Kalimantan Selatan

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, maupun sebagai badan usaha, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para anggotanya, sehingga sebagai lembaga ekonomi masyarakat sudah sewajarnya koperasi diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengelola jenis usahanya guna membangun diri menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu berperan menjadi soko guru perekonomian yang mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berikut disajikan perkembangan Koperasi di Kalimantan Selatan Kurun Waktu 2016 - 2021 pada tabel berikut:

Tabel 2.4.2
Perkembangan Kinerja Koperasi Periode 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Satuan	Data Awal Renstra (2015)	Renstra 2016-2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	2.582	2.559	2.587	2.620	2.606	2.651	2.651
	Pertumbuhan	Unit	-	-23	28	39	-14	45	-
	Aktif	Unit	1.769	1.775	1.770	1.737	1.743	1.759	1.749
	Tidak Aktif	Unit	813	784	817	883	863	892	902
	Persentase Koperasi Aktif	%	68,51	69,36	68,42	66,30	66,88	66,35	65,98
2	Anggota	Orang	348.161	369,325	379,809	396,197	377,207	378,732	379,400
3	RAT	Unit	711	669	674	635	630	459	512
	Persentase Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT	%	40,19	37,69	38,08	36,56	36,14	26,09	29,27
4	Sertifikat dan NIK	Unit	-	-	-	-	-	43	285

5	Manager	Orang	395	349	335	342	349	353	332
6	Karyawan	Orang	4.058	3.466	3.631	3.911	3.803	3.732	3.269
7	Modal Sendiri	Rp.Jt.	2.080.086	691.961	887.653	1.090.388	1.070.446	1.224.678	1.148.146
8	Modal Luar	Rp.Jt.	667.617	512.536	814.739	708.094	796.735	1.177.889	958.457
9	Volume Usaha	Rp.Jt.	1.391.774	1.270.269	1.095.447	1.648.539	1.203.748	933.441	786.581
10	Sisa Hasil Usaha	Rp.Jt.	132.766	104.818	122.776	115.747	171.963	103.896	136.535

Kinerja Koperasi di Kalimantan Selatan pada periode 2016 – 2021 mengalami pertumbuhan positif. Pada 2015 Jumlah Koperasi sebanyak 2.582 unit dan meningkat 70 unit (2,67%) menjadi 2.651 unit pada 2021 (per 31 Desember 2021).

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini merupakan tabel yang berisi data persentase koperasi yang aktif di Kalimantan Selatan periode 2016—2021:

Tabel 2.4.3
Data Persentase Koperasi Aktif tahun 2016 – 2021
Provinsi Kalimantan Selatan menurut Kab/Kota

No.	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Banjarmasin						
	Jumlah koperasi aktif	306	296	299	299	308	309
	Jumlah koperasi	498	506	510	510	519	520
	Persentase koperasi aktif	61,45	58,50	58,63	58,63	59,34	59,42
2	Kabupaten Tanah Laut						
	Jumlah koperasi aktif	112	91	85	88	96	102
	Jumlah koperasi	145	146	150	156	163	168
	Persentase koperasi aktif	77,24	62,33	56,67	56,41	58,90	60,71

3	Kabupaten Kotabaru						
	Jumlah koperasi aktif	146	147	153	98	103	110
	Jumlah koperasi	228	233	237	191	194	201
	Persentase koperasiaktif	64,04	63,09	64,57	51,31	53,09	54,73
4	Kabupaten Banjar						
	Jumlah koperasi aktif	149	154	156	161	161	166
	Jumlah koperasi	238	241	243	148	148	153
	Persentase koperasiaktif	62,61	63,90	64,20	64,92	64,92	108,50
5	Kabupaten Barito Kuala						
	Jumlah koperasi aktif	90	91	91	92	94	64
	Jumlah koperasi	140	140	120	121	121	121
	Persentase koperasiaktif	62,29	65	75,83	76,03	77,69	52,89
6	Kabupaten Tapin						
	Jumlah koperasi aktif	116	117	117	117	120	120
	Jumlah koperasi	142	143	143	143	146	146
	Persentase koperasiaktif	81,69	81,82	81,82	81,82	82,19	82,19
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan						
	Jumlah koperasi aktif	124	126	129	135	125	125
	Jumlah koperasi	163	152	168	172	162	162
	Persentase koperasiaktif	76,07	82,90	76,79	78,49	77,16	77,16
8	Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Jumlah koperasi aktif	53	54	54	54	54	40
	Jumlah koperasi	112	113	113	113	113	78
	Persentase koperasiaktif	47,32	47,79	47,79	47,79	47,79	51,28
9	Kabupaten Hulu Sungai Utara						
	Jumlah koperasi aktif	100	96	89	89	56	57
	Jumlah koperasi	125	126	126	126	127	128
	Persentase koperasiaktif	80	76,19	70,63	70,63	44,09	44,53
10	Kabupaten Tabalong						
	Jumlah koperasi aktif	76	77	57	58	60	60
	Jumlah koperasi	98	98	99	100	102	102
	Persentase koperasiaktif	77,55	78,57	57,58	58	58,82	58,82
11	Kota Banjarbaru						
	Jumlah koperasi aktif	111	112	126	132	156	156
	Jumlah koperasi	160	161	174	180	204	204
	Persentase koperasiaktif	69,38	69,57	72,41	73,33	76,47	76,47

12	Kabupaten Tanah Bumbu						
	Jumlah koperasi aktif	297	310	288	322	328	339
	Jumlah koperasi	347	360	368	372	378	391
	Persentase koperasiaktif	85,59	86,11	78,26	86,56	86,77	86,70
13	Kabupaten Balangan						
	Jumlah koperasi aktif	66	67	67	69	69	69
	Jumlah koperasi	106	108	108	110	110	110
	Persentase koperasiaktif	62,26	62,04	62,04	62,73	62,73	62,73
14	Provinsi						
	Jumlah koperasi aktif	29	32	26	29	29	32
	Jumlah koperasi	53	60	61	64	64	67
	Persentase koperasiaktif	50,88	53,33	42,62	40,63	45,31	47,76
	Total						
	Jumlah koperasi aktif	1.775	1.770	1.737	1.743	1.759	1.749
	Jumlah koperasi	2.559	2.587	2.620	2.606	2.651	2.651
	Persentase koperasiaktif	69,36	68,41	66,30	66,88	66,35	65,98

2.4.4.2 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2016-2021

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional maupun perekonomian daerah Kalimantan Selatan Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, 2016-2021 paling tidak dapat dilihat dari:

1. Penyedia Lapangan kerja terbesar;
2. Kedudukannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di berbagaisektor;
3. Pencipta Pasar baru dan sumber inovasi; dan
4. Pelaku penting dalam pengembangan kegiatan

ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategik SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.4
Jumlah UMKM Periode 2016- 2021 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Satuan	Akhir RPJMD 2011-2015	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha Mikro	Unit	147.070	157.096	290.335	320.557	333.919	376.233	326.786
2.	Usaha Kecil	Unit	10.304	11.437	12.900	13.524	20.090	32.533	33.222
3.	Usaha Menengah	Unit	2.438	2.676	2.778	2.994	3.308	3.140	2.839
	Jumlah	Unit	159.812	171.209	306.013	337.075	357.317	411.906	362.847

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun ke depan (tahun 2021-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2016-2021 dan perlu penyelesaian secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka ada 5 (lima) isu-isu strategis yang ada di bidang urusan koperasi usaha kecil dan menengah Kalimantan Selatan, yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi gubernur khusus pada misi ke-5 yaitu **Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan**, adapun isu secara umum Masih rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM, Produktif dan Berdaya Saing, tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Koperasi dan UKM
- Gerakan Reformasi Koperasi, Reformasi koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. Sebab koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas.
- Mengembangkan Koperasi Modern.
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang kualitas kinerjanya perlu ditingkatkan (nilai kemanfaatan untuk anggota, produktivitas, kondisi keuangan, belum menerapkan nilai & prinsip koperasi secara benar, terbatasnya akses informasi & saluran pemasaran dan jaringan usaha koperasi, terbatasnya pemanfaatan IT, skala usaha masih kecil, data base masih kurang).
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
- Melakukan Koordinasi terkait perluasan skema pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan melalui LPDB, Peningkatan peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam akses pembiayaan UMKM.
- c. Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
- Membangun strategi kemitraan komperhensif, strategi pengembangan dukungan program kemitraan antara usaha besar dan UMKM, Pengembangan Koperasi dan UMKM

melalui Digitalisasi, Peningkatan pengembangan perluasan pasar dan kawasan PKL.

d. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM

Melakukan penerapan standar kuantitas dan kualitas Diklat Perkoperasian dan UMKM melalui UPT Balatkop dan UMKM, kemudian mengembangkan pelatihan vocational bagi SDM koperasi dan UMKM.

e. Pengembangan Kewirausahaan

Menumbuhkembangkan wirausaha menjadi wirausaha handal, unggul dan tangguh melalui layanan pengembangan usaha dan pendampingan.

Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

1. Koperasi dan UMKM menjadi salah satu bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
2. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait

dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.

2. Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
4. Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
5. Masih adanya moral hazard dalam pengelolaan koperasi

2.4.5 Telaahan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tapin

Pembangunan Kabupaten Tapin dalam kerangka visi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah: **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa;
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan visi, misi dan program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 terfokus pada misi ke 2 (dua), yaitu **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”** dengan tujuan daerah **“Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah”** yang terdapat dalam sasaran daerah **“Meningkatnya Sektor Agrobisnis”** dan **“Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM”**.

Dalam hal ini telah selaras dengan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yaitu **“Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri”** dan **“Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM”** yang didukung dengan kinerja program dan kegiatan.

2.4.6 Telaahan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis, Kabupaten Tapin terletak di antara sebelah utara dengan Kabupaten HSS, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah

timur dengan Hulu Sungai Selatan, dengan luas 2.174,95 km², terdiri dari 12 kecamatan, 126 desa, dengan jumlah penduduk menurut data BPS Kabupaten Tapin tahun 2020 sebanyak 189.475,00 jiwa dan mempunyai berbagai aneka hasil alam yang termasuk di dalamnya adalah rotan, purun dan kaolin yang menjadi bahan mentah untuk pembuatan produk kerajinan khas daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian selaku pembina para pengrajin di Kabupaten Tapin terus berusaha meningkatkan kualitas produk kerajinan khas daerah melalui pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang secara konsisten diadakan setiap tahun. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dengan pemanfaatan hasil alam tersebut, khususnya terhadap produk kerajinan anyaman rotan, anyaman purun, dan kerajinan keramik hias berbahan kaolin serta kopiah jangang.

Berdasarkan perkiraan dampak program RPJMD terhadap isu strategis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dapat diambil kesimpulan bahwa program-program yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tidak mempunyai dampak negatif terhadap isu strategis KLHS tersebut. Hal ini dikarenakan program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin lebih terfokus pada pembinaan sumber daya manusia.

Namun pada perkembangannya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin perlu memetakan kawasan peruntukkan industri pada titik-titik lokasi yang ada di Kabupaten Tapin yang mempunyai

potensi dalam mengembangkan industri maupun UMKM lokal. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin membuat kegiatan “Kajian Kawasan Industri” yang terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Kajian Kawasan Industri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Perubahan 2023, kemudian akan dilanjutkan “Kajian Kawasan Industri” tahap kedua yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, terdapat permasalahan pembangunan menurut urusan perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM, khususnya sektor unggulan
URUSAN PILIHAN		
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya fasilitas pemerintah daerah dalam peningkatan pembinaan IKM

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya:

1. Belum maksimalnya partisipasi Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah;
2. Belum optimalnya kinerja koperasi dalam mengembangkan perekonomian; dan
3. Masih rendahnya pertumbuhan UMKM baru.

2.6 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin 2023-2026 adalah “**Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis**”, dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa;
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Adapun pengelolaan dan pengembangan sektor perindustrian, koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa (mendukung Misi Nomor 2).

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perindustrian, koperasi dan UMKM yang sejalan dengan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Tapin.

Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah dengan melalui:
 - a. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi Industri Kecil dan Menengah terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. Meningkatkan tata kelola penerbitan Izin Usaha Industri (IUI);
 - c. Meningkatkan penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
 - d. Meningkatkan kepatuhan industri dalam penyampaian data ke SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional);

- e. Meningkatkan wawasan pelaku usaha/IKM terhadap strategi perencanaan desain produk, diversifikasi produk dan finishing produk;
 - f. Mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas;
 - g. Meningkatkan jumlah IKM maupun UMKM dalam mendapatkan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk;
 - h. Merevitalisasi sarana rumah produksi sebagai tempat latihan (workshop) produksi keramik hias/kaolin;
 - i. Menetapkan kawasan peruntukkan industri; dan
 - j. Menyebarkan informasi produk IKM maupun UMKM melalui website informasi.
2. Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, dengan melalui:
- a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan koperasi melalui digitalisasi koperasi;
 - c. Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi.
3. Meningkatkan pertumbuhan UMKM, dengan melalui:
- a. Optimalisasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2.7 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan Rancangan RKPD.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan Rencana Kerja Tahun 2024			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	71	Rp.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Komponen AKIP	71	Rp.
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80%			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappelitbang	100%	Rp. 6.005.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappelitbang	100%	Rp. 7.500.189
		Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%	

		Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp. 6.005.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp. 7.500.189
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	Rp.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	Rp. 3.039.691.373
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%			Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Rp. 3.990.185.617	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Rp. 3.032.190.811

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 3.345.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 4.250.343
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp. 3.105.540	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp. 3.250.219
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70%	Rp.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70%	Rp. 1.585.376.766
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80%			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80%	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3.148.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3.830.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 41.837.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 50.497.110
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 17.226.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 90.902.322
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 6.192.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 22.406.304
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.387.600	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.354.830
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	Rp. 3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	Rp. 3.491.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 368.238.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 1.412.894.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 293.755.424
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	70%			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	70%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp. 95.223.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp. 293.755.424
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Rp.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80%	Rp. 188.167.824
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 62.976.564	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 64.135.024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 91.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 124.032.800

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 45.784.226
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp. 22.016.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp. 36.344.226
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 5.714.016	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 9.440.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat		Rp. 16.852.140	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		Rp. 16.852.140	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		

	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat	1 Pemerink atan	Rp. 16.852.140	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)		Rp. 11.304.850	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		Rp. 11.304.850	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		Rp. 11.304.850	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)		Rp. 34.853.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)		Rp. 44.666.250
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan		Rp. 34.853.400	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan		Rp. 44.666.250

	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan		Rp. 34.853.400	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Rp. 35.537.400	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		22,55%	Rp. 67.831.725
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi UMKM Daerah yang Baik			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi UMKM Daerah yang Baik		Rp. 67.831.725
		Persentase Pengemasan Produk Lokal yang Sesuai Standar				Persentase Pengemasan Produk Lokal yang Sesuai Standar		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Pelatihan Pengemasan Produk				Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Pelatihan Pengemasan Produk		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)				Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal				Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal				Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal		
		Persentase Pelaku Usaha				Persentase Pelaku Usaha		

		yang Mempunyai P-IRT				yang Mempunyai P-IRT		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin P-IRT				Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin P-IRT		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi yang Lulus Post Test				Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi yang Lulus Post Test		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi		Rp. 67.831.725
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Agro dan Kimia yang Masuk Pasar Modern		Rp.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Agro dan Kimia yang Masuk Pasar Modern		Rp. 1.116.906.404
		Persentase Peningkatan Omzet Penjualan Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia				Persentase Peningkatan Omzet Penjualan Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia		
		Persentase IKM Berbasis Agro dan Kimia yang Sesuai Standar				Persentase IKM Berbasis Agro dan Kimia yang Sesuai Standar		
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Agro dan Kimia				Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Agro dan Kimia		

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda		Rp.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda	100%	
		Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda				Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda		
		Persentase Pelaku Usaha IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk				Persentase Pelaku Usaha IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal				Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal				Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal		
		Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin dengan Baik				Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin dengan Baik		
		Persentase Informasi pada Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin yang Terupdate				Persentase Informasi pada Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin yang Terupdate		

		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA				Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA		
		Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia				Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia		
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia				Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Rp. 13.138.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Rp. 74.580.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	Rp. 105.258.852	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	1 Dokumen	

		Industri				dan Prasarana Industri		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	Rp. 404.384.920	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,08%	Rp. 33.663.600	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,08%	Rp. 119.676.976
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38%			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38%	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Rp. 33.663.600	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki NIB		Rp. 118.723.516

	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terlaksananya Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1 Pelatihan	Rp. 33.663.600	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Rp. 118.723.516
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,08%	Rp.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	3,08%	Rp. 350.491.351
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38%			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	3,38%	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	Rp.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah		Rp. 350.491.351

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Laporan	Rp. 92.609.300	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Rp. 97.734.378
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	12 Bulan	Rp. 53.535.300	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	Rp. 234.880.897
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	12 Bulan	Rp. 18.664.785	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Rp. 17.076.076
	TOTAL PAGU INDIKATIF			Rp. 5.615.185.384	TOTAL PAGU INDIKATIF			Rp. 6.891.837.542

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

9 (sembilan) Misi tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya

ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi

yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui: (1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas; (2) inkubasi usaha; (3) penguatan kapasitas layanan usaha; (4) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan (5) penyediaan insentif fiskal. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan: (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.

Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (1) peningkatan produktivitas; (2) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3)

diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (4) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (5) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (6) penguatan jasa industri; (7) penguatan penerapan manajemen industri modern; (8) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (9) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian difokuskan pada: (1) industri pengolahan hulu agro, kimia dan logam; dan (2) industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Pelaksanaannya juga didukung oleh harmonisasi dan sinergi kebijakan antara sektor primer, sekunder dan tersier.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta

standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*. Khusus untuk industri pengolahan perikanan dan hasil laut, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui perbaikan kualitas, kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah, penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI), penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional, penguatan *branding* produk perikanan Indonesia, dan pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital.

Pelaksanaan industrialisasi yang berbasis investasi juga disinergikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM. Sinergi ini diwujudkan dalam kemitraan usaha hulu hilir dengan usaha-usaha rakyat dalam bentuk sentra IKM, termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola koperasi, usaha perdesaan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan,

peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintang Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni. Selain itu, terdapat 18 KI (KI Ladong, KI Kuala Tanjung, KI Tanjung Buton, KI Tenayan, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, KI Brebes, KI Madura, KI Sumbawa Barat, KI Batanjung, KI Jorong, KI Batuluciu, KI Tanah Kuning, dan KI Takalar) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Dukungan untuk KI juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri.

3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam

negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.

4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Sementara itu, Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD periode ini merupakan tahapan keempat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk mewujudkan wilayah perdagangan dan

jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera.

RPJMD KALSEL 2021 - 2026	RPJPD KALSEL 2005 - 2025
VISI	
“Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.	“Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri”
MISI	
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

1) Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

1. Masih rendahnya kualitas kinerja kelembagaan Koperasi;
2. Masih banyaknya koperasi tidak aktif;
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparat Koperasi;
4. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan);
5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM;
6. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global;
7. UMKM menurun dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia, terkhusus di Indonesia.

2) Sektor Perindustrian

1. Pemasaran yang terbatas;
2. Lemahnya struktur industri;
3. Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri;
4. Masih rendahnya kualitas SDM industri;
5. Belum tersedianya lahan *clear* dan *clean* untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri;
6. Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (*valid* dan *up to date*) untuk menarik investasi dan pengembangan industri;

7. Lambatnya investasi di sektor hilir industri;
8. Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan;
9. Masih rendahnya produktivitas industri;
10. Kurangnya jumlah wirausaha industri.

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 18.71% di tahun 2019 menjadi 18.29%. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri. Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. berdasarkan PDRB Provinsi Kalsel Tahun 2020. kontribusi sektor pertanian sebesar 14.39%. Industri 13.52% dan Perdagangan sebesar 10.46%.

Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya.

pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp.12.032 juta per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1.68% per tahun. Covid-19 selama tahun 2020 memberikan dampak terhadap turunnya pengeluaran perkapita masyarakat Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor-sektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal. Share Sektor Pertambangan tahun 2016 tercatat 20,98% dan turun menjadi 18,29% di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan share dari sektor pengganti lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor Perdagangan dari 9,41% menjadi 10,46%, dan Konstruksi dari 7,83% menjadi 8,26%. Share dari sektor unggulan yakni Pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2020

cenderung dinamis meskipun mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2013 memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 yang hanya mencapai 3,82%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mulai menunjukkan angka yang membaik dengan tumbuh sebesar 4,40% dan mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 5,28% akibat adanya fenomena commodities boom. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh melambat sebesar 5,13% dan 4,01%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,81%.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 berada di urutan ke-3 setelah Kalimantan Utara (-1,11%) dan Kalimantan Tengah (-1,4%).

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh adanya tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diproyeksikan akan mengalami perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Peningkatan investasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya

melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Diharapkan, prospek sector pertanian dan industri pengolahan akan memberikan *multiplayer effect* terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi. Masih ketergantungan dengan komoditas bahan mentah/setengah jadi. Komoditas utama Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit, karet dan kayu lapis kebanyakan langsung dijual tanpa pengolahan sehingga Ketika harga menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Dalam mendongkrak perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan lain-lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2023

Visi dan misi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama menuju kondisi masa depan yang

diinginkan secara lebih nyata dan rasional dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Tabel 3.2.1
Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	<ul style="list-style-type: none"> Bersama 	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan 	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<ul style="list-style-type: none"> Maju 	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sejahtera 	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Agamis 	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten

Tapin disusun sebagai berikut:

Tabel 3.2.2

**Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2018-2023**

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara Berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa;
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Dinas Perindustrian sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu terkait dengan Misi Kedua: **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa”**.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu strategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman koperasi;
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit Industri di Kabupaten Tapin;
- 4) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin; dan
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis; dan
2. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM.

Sedangkan sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri; dan
2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tercantum sebagaimana dalam tabel Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berikut ini:

Tabel 3.2.3
Rencana Strategis Tahun 2018-2023

RENSTRA										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat (%)			80	80	80	80	80
			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat			80	80	80	80	80
2	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	6,99	7,03	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00

			Persentase PDRB Sektor Perindustrian		6,21	6,22	6,24	6,26	6,28	6,30
3	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kontribusi Sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,7
			Persentase Koperasi Berkualitas (%)	23,28	25,64	27,4	29,9	32,5	35	37,6
			Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan (%)	63	78	80	82	84	86	88

Tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menetapkan tujuan dan sasaran pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Tahun 2023
(sebelum perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2023
Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian (%)	6,30%
Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas (%)	37,6%
		Persentase Usaha Mikro yang Labanya Meningkatkan (%)	88%

Sementara itu, Kabupaten Tapin menjadi salah satu daerah dengan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Di dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, merumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 yaitu salah satunya di sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan permasalahan **“Kuranginya Daya Saing Koperasi dan UMKM, khususnya sektor unggulan”**.

Maka tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yaitu **“Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah”** dengan sasaran strategis OPD **“Optimalisasi Kinerja Koperasi dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan”** dan **“Meningkatnya Pertumbuhan UMKM”**.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan rencana aksi pada tahun 2022, maka Dinas Perindustrian perlu menindaklanjuti tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Perindustrian untuk tahun 2023. Pada triwulan III – triwulan IV Tahun 2023, Dinas Perindustrian menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan

tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian pada dokumen RPD Tahun 2024 – 2026, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2.5

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Tahun 2023 – 2026

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN	KONDISI AWAL		TARGET				
							Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
1.	Tujuan SKPD 1: Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah nilai produksi IKM tahun n – Jumlah nilai produksi IKM tahun n-1 / Jumlah nilai produksi IKM tahun n-1 x 100	1. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia 2. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	Data Peningkatan Nilai Produksi IKM	Konversi Perhitungan Capaian IKU Kualitatif Menjadi Kuantitatif AA: >90-100 (Sangat Memuaskan) A: >80-90 (Memuaskan) BB: >70-80 (Sangat Baik) B: >60-70 (Baik) CC: >50-60 (Cukup/Memadai) C: >30-50 (Kurang) D: <30 (Sangat Kurang)	2,16	2,40	2,63	2,70	2,75	2,80	2,80
2.	Sasaran SKPD: Meningkatnya Partisipasi IKM dalam Perekonomian Daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Bertumbuh	Jumlah IKM tahun (n) – Jumlah IKM tahun (n-1) / Jumlah IKM tahun n-1 x 100	1. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia 2. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka	Data Pertumbuhan IKM		1,3	0,95	1,12	1,13	1,15	1,16	1,16
3.	Tujuan SKPD 2: Meningkatkan Kapasitas UMKM Daerah	Persentase UMKM Binaan yang Naik Skala Usaha	Jumlah UMKM binaan yang naik skala usaha / Jumlah keseluruhan UMKM binaan x 100	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data UMKM Binaan yang Naik Skala Usaha		-	-	20,05	20,55	21,15	21,65	21,65
4.	Sasaran SKPD 1: Optimalisasi Kinerja Koperasi dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah koperasi sehat (koperasi yang menjalankan RAT tiap tahun, pertumbuhan omset, dan manajemen yang baik) / Jumlah koperasi aktif x 100	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data Koperasi Sehat		10,74	12,39	19,56	21,73	22,82	27,17	27,17

5.	Sasaran SKPD 2: Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Baru	Jumlah UMKM tahun n – Jumlah UMKM tahun n-1 / Jumlah UMKM tahun n-1 x 100	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data Pertumbuhan UMKM Baru		105,68	20,58	22,5	22,75	23,05	23,25	23,25
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bobot Maksimal Komponen yang Dinilai: Perencanaan Kinerja = 30 Pengukuran Kinerja = 30 Pelaporan Kinerja = 15 Evaluasi Kinerja = 25	73,22	70,31	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP – Perencanaan Kinerja					25,57	22,50	25,57	25,57	25,57	25,57	
		Nilai Komponen AKIP – Pengukuran Kinerja					14,69	18,00	14,69	14,69	14,69	14,69	
		Nilai Komponen AKIP – Pelaporan Kinerja					10,69	11,55	5,90	5,90	5,90	5,90	
		Nilai Komponen AKIP – Evaluasi Kinerja					5,90	18,25	16,38	16,38	16,38	16,38	
		Nilai Komponen AKIP – Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (komponen tahun lalu yang kemudian dihilangkan)					16,38						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 dibuat sebagai pedoman arah kerja perubahan bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang semuanya dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Tapin.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024

Hasil Analisis Kebutuhan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024				
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Komponen AKIP	71	Rp. 6.652.613.302
		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	80%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Perencanaan dan Pelaporan atas Rekomendasi dari Mitra Kerja di Bappelitbang	100%	Rp. 6.010.800
		Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindaklanjuti	100%	

		Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	100%	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp. 6.010.800
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai Standar Penatausahaan Keuangan	100%	Rp. 3.078.847.292
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Rp. 3.072.396.352

3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 3.345.400
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp. 3.105.540
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70%	Rp. 3.025.330.040
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80%	

3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 3.978.300
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 111.716.500
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 46.772.200
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 55.822.640
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.541.000
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp. 3.000.000
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 2.802.499.400

3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 298.768.900
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Rp. 298.768.900
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	80%	Rp. 197.872.044
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 62.976.564
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 134.895.480
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	Rp. 45.784.226
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp. 36.344.226

3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp. 9.440.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	10%	Rp. 27.809.310
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	10%	Rp. 27.809.310
		Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat	40%	

2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Anggota Koperasi	Rp. 27.809.310
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat (2)	10%	Rp. 27.809.310
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	10%	Rp. 27.809.310
		Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat	40%	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Rp. 27.809.310

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (3)	10%	Rp. 49.009.310
2.17.06.2.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	10%	Rp. 49.009.310
		Persentase Koperasi Aktif yang Mempunyai Sertifikat	40%	

2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 Orang	Rp. 49.009.310
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Produk UMKM Lokal yang Masuk Pasar Modern	10%	Rp. 208.779.860
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi UMKM Daerah yang Baik	1%	Rp. 208.779.860
		Persentase Pengemasan Produk Lokal yang Sesuai Standar	25%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Pelatihan Pengemasan Produk	50%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	50%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal	25%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal	50%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai P-IRT	40%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin P-IRT	50%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi yang Lulus Post Test	100%	

2.17.08.2.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Rp. 208.779.860
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Agro dan Kimia yang Masuk Pasar Modern	50%	Rp. 2.205.446.822
		Persentase Peningkatan Omzet Penjualan Produk Unggulan Daerah Berbasis Agro dan Kimia	0,27%	
		Persentase IKM Berbasis Agro dan Kimia yang Sesuai Standar	0,47%	
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Agro dan Kimia	0,63%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jenis Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan Melalui Dekranasda	33,3%	Rp. 2.205.446.822
		Persentase Partisipasi Event Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Dekranasda	100%	
		Persentase Pelaku Usaha IKM yang Mendapatkan Fasilitas Legalitas Merk	100%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal	9,30%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengurus Izin Sertifikat Halal	1,07%	

		Persentase Pengelolaan Website Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin dengan Baik	10%	
		Persentase Informasi pada Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin yang Terupdate	50%	
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Galeri TAMASA	3,03%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia	0,31%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Agro dan Kimia	0,39%	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Rp. 14.183.700

3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Rp. 945.681.860
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Rp. 131.275.752
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	Rp. 1.114.305.510
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Logam dan Aneka yang Masuk Pasar Modern	25%	Rp. 168.903.156
		Persentase IKM Berbasis Logam dan Aneka yang Sesuai Standar	54,72%	
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Logam dan Aneka	4,97%	

3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	54,72%	Rp. 168.903.156
		Persentase Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi yang Lulus Post Test	50%	
		Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Diversifikasi Produk Berbasis Logam dan Aneka	0,19%	

		Persentase Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Logam dan Aneka	9,95%	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelatihan	Rp. 168.903.156
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Produk IKM Lokal Berbasis Logam dan Aneka yang Masuk Pasar Modern	25%	Rp. 175.254.546
		Persentase IKM Berbasis Logam dan Aneka yang Sesuai Standar	54,72%	

		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Logam dan Aneka	4,97%	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Menyampaikan Data SIINas	2,48%	Rp. 175.254.546
		Persentase IKM yang Mengikuti Koordinasi dalam Menyampaikan Data SIINas	4,97%	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Rp. 126.000.000
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	Rp. 16.527.273

3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Kegiatan	Rp. 32.727.273
TOTAL PAGU INDIKATIF				Rp. 9.517.572.506

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan ini memuat tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi pada triwulan III dan triwulan IV dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin maupun di lingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis”.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN